

ABSTRAK

”Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Dhubungkan Dengan Kriminologi (Studi Putusan No:PUT KKEP / 11 / IX / 2018 / KKEP)

Oleh:

Misseris Cordiasi simanjuntak
190315032

Oknum polisi yang melanggar aturan hukum dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP pasal 263 merupakan tindakan pelanggaran kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer. Dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka yang menjadi analisis penulis dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan sebab pelaku telah melakukan tindak pidana dan telah melanggar pasal 263 ayat 2 tentang pemalsuan surat dimana itu dilakukan pelaku secara sengaja melalui perantara orang lain. Dimana yang bersangkutan sebelumnya juga pernah melakukan pelanggaran disiplin namun sanksi yang diberikan hanya sanksi pidana selama 21 hari. Sebab dalam pasal 11 peraturan pemerintah No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri bagi anggota polri yang melakukan tindak dipidana akan diberhentikan dengan tidak hormat, namun berdasarkan keputusan yang berwenang menetapkan bahwa yang bersangkutan masih layak dipertahankan di keanggotaan polisi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa lemahnya peradilan hukum di anggota kepolisian dimana hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.

Kata kunci: Implementasi, kode etik, pemalsuan, pemberhentian

ABSTRACT

"Implementation of Government Regulation No. 1 of 2003 concerning Dismissal of Police Members in Relation to Criminology Study of Decision No: PUT KKEP /11/IX/2018/KKEP"

BY

Misseris Cordiasi simanjuntak
190315032

Police officers who violate the rule of law in the crime of forgery of letters stipulated in Article 263 of the Criminal Code are acts of violation of the code of ethics because every member of the National Police is obliged to maintain the rule of law and maintain the honor, reputation and dignity of the Indonesian National Police. Violations of the code of ethics will be examined and if proven will be sanctioned. The imposition of disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics does not remove the criminal charges against the police officers concerned will still be processed by the criminal procedure law even though they have undergone disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics. The research conducted is descriptive legal research analysis and uses empirical juridical research type, namely the combination or normative juridical approach with empirical elements taken primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and also this research manages existing data using qualitative analysis. Based on the research conducted, what becomes the author's analysis in this decision is the inappropriateness of the sanctions given to the person concerned because the perpetrator has committed a criminal offense and has violated Article 263 paragraph 2 concerning forgery of letters where it was carried out by the perpetrator intentionally through the intermediary of another person. Where the person concerned has also previously committed a disciplinary violation but the sanction given is only city arrest for 21 days because in article 11 of government regulation no.1 of 2003 concerning the dismissal of police members. In this case it shows that the weak legal justice in the police force where it can cause a lack of public trust in the police.

Keywords: Implementation, code of ethics, forgery, dismissal